

**LAPORAN KEGIATAN
DATA ANALYTIC
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**IRFAN REZA PUTRA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU**

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor atas penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang dibandingkan dengan anggaran atau rencananya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa untuk diberikan saran-saran perbaikan dalam rangka mendorong percepatannya.

Kegiatan Evaluasi PAPBJ Daerah dapat dilakukan secara mandiri oleh BPKP dan/atau dilakukan dengan berkoordinasi dan/atau berkolaborasi dengan APIP Daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara triwulanan yang diharapkan bisa memberikan informasi lebih dini agar dapat segera ditindaklanjuti pada triwulan berikutnya pada tahun berjalan.

Evaluasi atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah memfokuskan pada pengumpulan dan analisis data-data yang terkait dengan penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa pada pemerintah daerah untuk membangun argumentasi bagi perumusan rekomendasi

B. Cakupan Pengawasan

Cakupan pengawasan adalah penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah per tanggal 15 Maret 2022 dengan cakupan analisis meliputi:

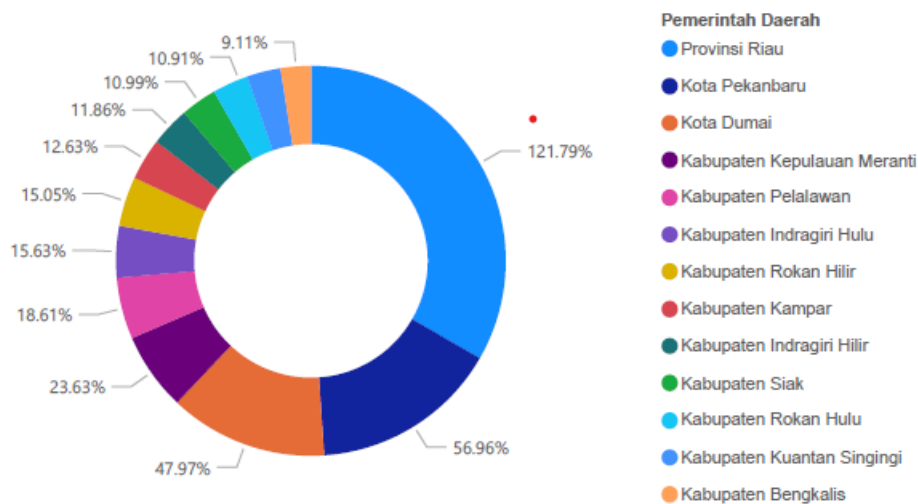
- a. Analisis Postur APBD;
- b. Analisis Kemandirian Keuangan;
- c. Analisis capaian realisasi pendapatan, belanja dan PBJ Daerah (tidak termasuk proses PBJ dan proses pengelolaan keuangan daerah);

C. Kegiatan Data Analytic

D. Uraian Analisis Data dan Hasilnya

1) Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan 2022



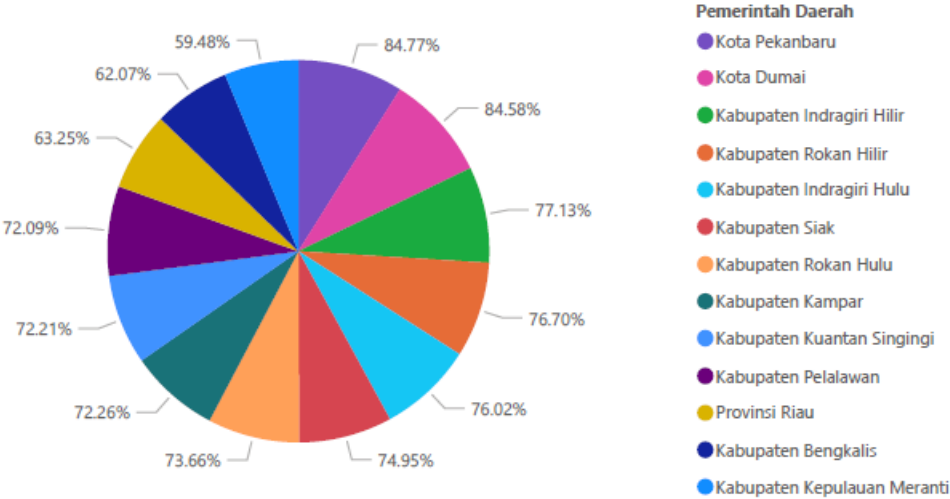
Nama Pemerintah Daerah	Total PAD 2022	Pendapatan Transfer 2022
Provinsi Riau	4,753,701,510,878	3,903,144,876,979
Kota Pekanbaru	929,009,757,083	1,631,112,817,764
Kota Dumai	392,981,073,390	819,257,806,934
Kabupaten Siak	204,287,067,799	1,858,879,692,357
Kabupaten Rokan Hulu	125,897,928,500	1,153,864,260,343
Kabupaten Rokan Hilir	251,249,950,500	1,669,012,000,000
Kabupaten Pelalawan	204,778,000,000	1,100,279,654,000
Kabupaten Kuantan Singingi	121,046,062,547	1,185,937,724,261
Kabupaten Kepulauan Meranti	222,842,417,496	943,185,009,372
Kabupaten Kampar	270,587,472,871	2,141,579,434,287
Kabupaten Indragiri Hulu	198,346,877,816	1,269,062,245,472
Kabupaten Indragiri Hilir	199,089,245,389	1,678,280,902,292
Kabupaten Bengkalis	289,630,071,969	3,180,559,873,869

Rata-rata Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Riau adalah 35,92%. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tertinggi pada Pemerintah Provinsi Riau dengan Rasio 121,71% yang dikategorikan Delegatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Sedangkan 10 Pemerintah Kabupaten dikategorikan instruktif,

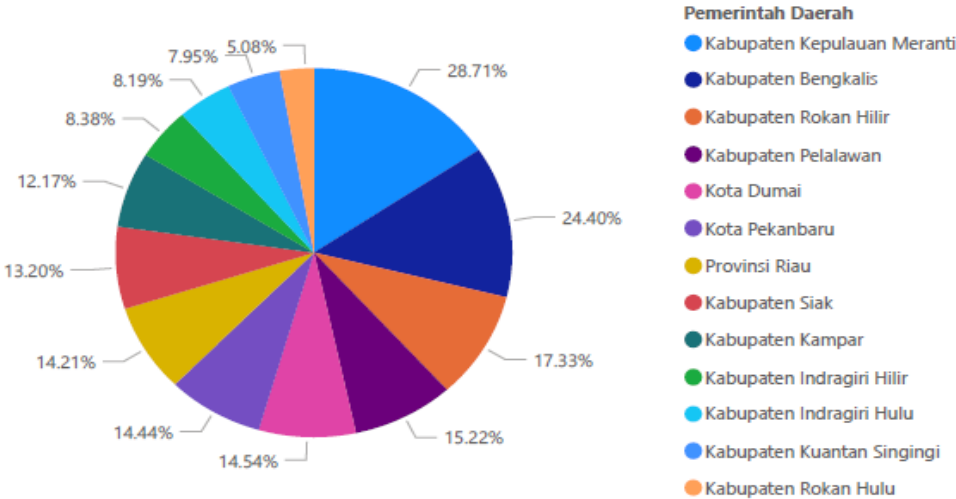
Pemerintah Kota Dumai dikategorikan Konsultatif, dan Pemerintah Kota Pekanbaru dikategorikan Partisipatif yang mana masih diperlukan nya campur tangan dari Pemerintah Pusat.

2) Keserasian/Postur APBD

Rasio Belanja Operasional Terhadap Total Belanja 2022



Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja 2022



Rata-rata Alokasi Belanja Operasional pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Riau adalah 70,58%. Rata-rata Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Riau adalah 14,86%. Rasio di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dalam membangun/menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung lebih kecil. Alokasi Belanja Modal Tertinggi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti sebesar 24,40% dan 28,71%.

3) Realisasi Pendapatan

Jenis Pendapatan	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah s.d 15 Maret 2022		
	Target Tahun 2022 (Rp)	Realisasi s.d. 15 Maret 2022 (Rp)	% Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	8.095.087.336.238	748.256.453.386	9,24
Pendapatan Transfer	22.534.156.297.930	1.863.937.350.733	8,27
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	68.360.100.000	1.197.940.000	1,75
Total	30.697.603.734.168	3.237.851.863.638	10,55

Dari tabel diatas terlihat bahwa target pendapatan sampai dengan 15 Maret 2022 baru terealisasi sebesar 10,55% dari targetnya.

Secara umum, penyebab masih rendahnya realisasi pendapatan adalah:

- a) Kelemahan penyusunan potensi/target pendapatan;
- b) Kurang optimalnya Perangkat Daerah (PD) terkait dalam melakukan penagihan pajak atau retribusi daerah sehingga mengakibatkan kurangnya pendapatan daerah;
- c) Berubahnya alokasi penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat;
- d) Menurunnya kondisi perekonomian yang berdampak pada menurunnya pendapatan wajib pajak/retribusi.

4) Realisasi Belanja

Jenis Belanja	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah s.d. 15 Maret 2022		% Realisasi
	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d. 15 Maret 2022 (Rp)	
Belanja Pegawai	11.275.319.618.412	1.077.113.828.652	9,55
Operasional Lainnya	11.803.998.416.018	501.920.195.280	4,25
Belanja Modal	4.858.450.739.315	52.547.018.361	1,08
Belanja Tidak Terduga	239.519.872.996	524.806.802	0,22
Belanja Transfer	4.523.484.134.960	10.426.937.653	0,23
Total	32.700.772.781.701	1.642.532.786.748	5,02

Dari tabel di atas diketahui jumlah realisasi belanja seluruh pemerintah daerah di Provinsi Riau sampai dengan 15 Maret 2022 sebesar Rp1.642.532.786.748,00 atau 5,02% dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp32.700.772.781.701,00.

Penyerapan anggaran tertinggi terjadi pada belanja pegawai dengan realisasi sebesar Rp1.077.113.828.652,00 atau 9,55% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp11.275.319.618.412,00. Sedangkan tingkat penyerapan terendah adalah belanja tidak terduga dengan realisasi sebesar Rp524.806.802,00 atau 0,22% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp239.519.872.996,00.

Secara umum penyebab masih rendahnya penyerapan anggaran, yaitu:

- Adanya keterlambatan penetapan pejabat pengelola anggaran (PA, KPA, PPK dan PPTK) pada beberapa pemerintah daerah;
- Lambatnya penginputan anggaran oleh beberapa PD ke system aplikasi penatausahaan keuangan;
- Keterlambatan proses tender beberapa paket-paket PBJ, sehingga rencana penyerapan anggaran untuk pembayaran uang muka yang menggunakan alokasi anggaran belanja modal menjadi tertunda